

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hajati, S., Winarsi, S., & Moechthar, O. (2022). Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking Di Indonesia. Airlangga University Press. Hlm.78
- Marzuki, P., M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenadamedia.
- Oemar Moechthar, S. H., & Kn, M. (2024). Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris Dan PPAT. Prenada Media. Hlm. 10
- Pugung, S. (2021). Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum. Deepublish. Hlm. 150
- Purwati, Ani. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Rahim, A., & Rahim, M. I. F. (2021). Pokok-Pokok Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata. Humanities Genius. Hlm. 11
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Muksalmina, M. R., Rusydi, M. T., Mardiyanto, N. K. H. I., Churniawan, E., Agustiwi, M. J. A., Bariah, G. M. S. C., & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Sihombing, Agustinus., *et al.* *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka. 2023
- Suadi, Amran. (2022). Wanprestasi dan Perbuatan Melawan hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jakarta. KENCANA.

Syahrum, Muhammad. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang diperbaharui (R.I.B)

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) (*Staatsblad* Tahun 1837 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5893).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630)

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bil.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Diawati, I. A. (2024). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Karena Pewarisan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang).

Herawati, Anita. (2025). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Berdasarkan*

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau).
- M. Faiz A. W., (2025), *Ratio decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Izin Poligami Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch* (Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Cilacap), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto), Hlm. 12
- Mochammad Iwan, S. (2023). *Keabsahan Akta Jual Beli Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Penjual Melakukan Perbuatan Melawan Hukum* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 41/Pdt. G/2019/PN. Lmg), (Tesis, Universitas Narotama). Hlm 139
- M. Ongko K, (2025), *Tinjauan Yuridis Pemberian Ganti Kerugian akibat Perbuatan Melanggar Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Bundaran Dolog* (Studi Kasus Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PN.Sby), (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.), , hlm. 46
- Risha, D. A. (2022). *Akibat Hukum Atas Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Hak Membeli Kembali* (Studi Putusan Nomor: 38/Pdt. G/2019/Pn. Bdw) (Skripsi, Universitas Medan Area). hlm.35
- Sihombing, T. M. P. (2022). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat* (Skripsi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta).

Sutansyah, F. V. (2022). *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Desa Badung Provinsi Bali (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2593K/Pdt/2020)* (Skripsi, Universitas Nasional, Jakarta).

Wijaya, A. T. (2023). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Yang Berasal Dari Tanah Warisan Di Kabupaten Blora* (Skripsi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta).

Jurnal

Attaubah, Agi H., *et al*, (2025), Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 10, No. 1, , hlm. 127

Agustin, E., & Harahap, I. (2025). AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH. Collegium Studiosum Journal, 8(1), hlm. 153

Amin, M., Septyanun, N., & Erwin, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Pada Jual Beli Hak Atas Tanah. Collegium Studiosum Journal, vol 6 no.(2), Hlm.480.
<https://doi.org/10.56301/cs.v6i2.1099>,

Ardiansyah, R., Asmarudin, I., & Widyastuti, T. V. (2023). *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Peralihan Hak Atas Tanah*

- Dengan Sertipikat Hak Milik. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 267-278. doi:<https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.31>
- Aristiawati, A. K. F., & Nugroho, M. W. (2022). Urgensi BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Jual Beli. *Rechtenstudent*, 3(1), 116-133. doi:<https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.102>
- Avivah, L., N. Sutaryono, S., & Andari, D. W. T. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 197–210. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186>
- Dimas, R. (2021). Publikasi Pendaftaran Tanah Di Negara Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum. *PROSIDING SERINA*, 1(1), hlm.210
- Ekawati, D., Wardhani, D. K., Prastiwi, D. E., Prayitno, S., & Purwanto, A. (2021). Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Community Service Journal*, 2(1), 90-101.
- Perdana, M. P., Herlina, N., & Rusydi, I. (2022). Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 30/Pdt. G/2016/PN. Cbn). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1), 45-59.
- Endang Hardian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Sleman, 2020, hlm. 16
- Jenar, Saptono. (2022). Pengaturan Teknik Pembentukan Keputusan Presiden (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Keppres Nomor 26 Tahun 2018 Tentang RAN-PPDT Tahun 2019). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 166-194.

- Avivah, L. N., Sutaryono, S., & Andari, D. W. T. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 197-210.
- Morad, A., Baharudin, A., & Satria, S. (2025). Evaluasi Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Proses Sertifikasi Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buol. *At-Tanwir Law Review*, 5(2). Hlm. 503
- Nurdiansyah, R. (2025). Dilema Etis Dalam Yudisial Menyelaraskan Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2(1)), 217-230.
- Palar, V. C. E., & Mekka, M. F. (2023). Wanprestasi Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Susun yang Dibuat oleh Notaris. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), hlm.36
- Perdana, M. P., Herlina, N., & Rusydi, I. (2022). Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 30/Pdt. G/2016/PN. Cbn). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1), 45-59. <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v10i1.7194>
- Prawira, G. B. G., Nugraha, Y. P., & Sugiarto, A. (2023). Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppb) Dalam Transaksi Jual Beli Tanah. *Jurnal Education and Development*, 11(1), 270-274. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4453>
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), hlm.15.

- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 31-40.hlm. 34
- Ratu, Rafles. (2022). Aspek Hukum Perjanjian Tukar Menukar (Barter) Tanah Hak Milik. *Lex Crimen*, 11(2). 83-90.
- Sari, Indah. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). 53-70.
<https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, cetakan ke-4 , Jakarta, Prenada Media, 2015, hlm. 61.
- Sukmawati P. D., (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89-102.
<https://doi.org/10.23887/jih.v2i2.1015>
- Sumarna, Dadang, & Kadriah, Ayyub. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02). 101-113.
<https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Triani, N. K. E., Sukadana, I. K., & Suryani, L. P. (2021). Pewarisan Hak Atas Tanah Yang Dibebankan Hak. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 52-56.
<https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.52-56>
- Waluyo, Bagus. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14-22.

Winarni, Iin, & Harjono. (2021). Studi Kajian Tentang Pelaksanaan Sita Persamaan (Vergelijkende Beslag) Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pdt. G/2016/PN. Cms). *Verstek*, 9(1). 122-128.
<https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.49997>

Yuliska, Edwin. Upaya Hukum Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Yang Belum Memuaskan Pihak Berperkara. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 2023, 11.2 November, hlm. 119

Zaid, Y. M., Ismail, I., & Iryani, D. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Sistem Hukum Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 4(2). Hlm.324

Website

Bernadetha. A.O. (2024). Mengenal Jenis-Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-sita-dalam%20hukum-acara-perdata-lt5efecaabbaf83/>. Diakses pada 24 Juni 2025